

Judul : Fayakhun Klaim Berjasa
Tanggal : Kamis, 01 Februari 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Fayakhun Klaim Berjasa

Ada saling klaim sebagai pihak yang berjasa dalam meloloskan satelit monitoring dan "drone" di Bakamla tahun 2016. Klaim ini berujung pada pemberian imbalan.

JAKARTA, KOMPAS — Ada dua pihak yang saling mengklaim sebagai pihak yang berjasa dalam meloloskan anggaran pengadaan satelit monitoring dan *drone* di Badan Keamanan Laut tahun 2016. Kedua pihak tersebut adalah anggota DPR dari Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi, dan tenaga ahli Kepala Bakamla, Ali Fahmi alias Fahmi al Habsyi.

Fayakhun mengklaim dirinya sebagai pelaku langsung dalam pembahasan anggaran pengadaan satelit monitoring dan *drone* senilai Rp 850 miliar di Bakamla. Klaim itu diduga berujung pada pemberian imbalan Rp 12 miliar dari Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah, pemenang lelang pengadaan satelit monitoring dan *drone*, kepada Fayakhun.

Upaya klaim itu muncul karena Ali Fahmi juga meminta imbalan dari Fahmi Darmawansyah senilai Rp 24 miliar yang akan dibagikan kepada sejumlah anggota DPR serta pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Ali Fahmi sebelumnya menemui beberapa anggota DPR dan meminta agar sejumlah anggaran di Bakamla diloloskan, termasuk pengadaan satelit monitoring dan *drone*.

Adanya saling klaim itu diakui Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan korupsi pengadaan satelit monitoring dan *drone* dengan terdakwa Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (31/1).

"Saya dengar (ada konflik saling klaim antara Fayakhun dan Ali Fahmi). Untuk itu, saya lakukan kewaspadaan. Makanya, saya bilang, kok, jadi begini," kata Arie.

Arie mengaku menggunakan Ali Fahmi sebagai narasumber atau tenaga ahli untuk mem-

bantu menyusun perencanaan pengadaan. Ali Fahmi juga berusaha meyakinkan dirinya bahwa anggaran pengadaan satelit monitoring dan *drone* itu akan digolkan oleh DPR.

Belakangan, lanjut Arie, dia mendengar ada upaya saling klaim antara Fayakhun dan Ali Fahmi. "Saat itu, saya sampaikan bahwa Bakamla tetap Bakamla dan saya lebih memercayai Nofel (terdakwa)," ujarnya.

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amir Nurdianto, kemudian membuka sejumlah bukti percakapan yang memuat klaim Fayakhun bahwa dia adalah pelaku langsung dalam pembahasan anggaran pengadaan barang dan jasa di Bakamla. Dalam percakapan itu, Fayakhun pun menegaskan bahwa dia adalah pelaku langsung, bukan aktor di belakang layar dalam pembahasan anggaran ini.

Bukti percakapan

Klaim Fayakhun itu terungkap dalam percakapan di aplikasi Whatsapp antara Muhammad Adami Okta, keponakan Fahmi, dan Erwin Arif, Managing Director Rohde and Schwarz. Rohde and Schwarz adalah perusahaan penyedia satelit monitoring dan *drone* untuk PT MTI.

Selain memuat tentang klaim, Fayakhun pun meminta kepada Erwin agar sesuatu yang dia inginkan dapat segera dipenuhi. Pemberitahuan itu disampaikan pada akhir April 2016. Beberapa hari kemudian, pada awal Mei, Fayakhun mengirimkan pesan kepada Erwin terkait imbalan

untuk dirinya, termasuk prosedur pengiriman imbalan itu.

Dalam persidangan sebelumnya terungkap, Fayakhun meminta imbalan untuk pembahasan anggaran satelit monitoring dan *drone* itu sebesar Rp 12 miliar. Imbalan itu 1 persen dari nilai usulan pengadaan satelit monitoring dan *drone* sebesar Rp 1,2 triliun. Imbalan itu lalu dipakai untuk membiayai Musyawarah Partai Golkar Mei 2016.

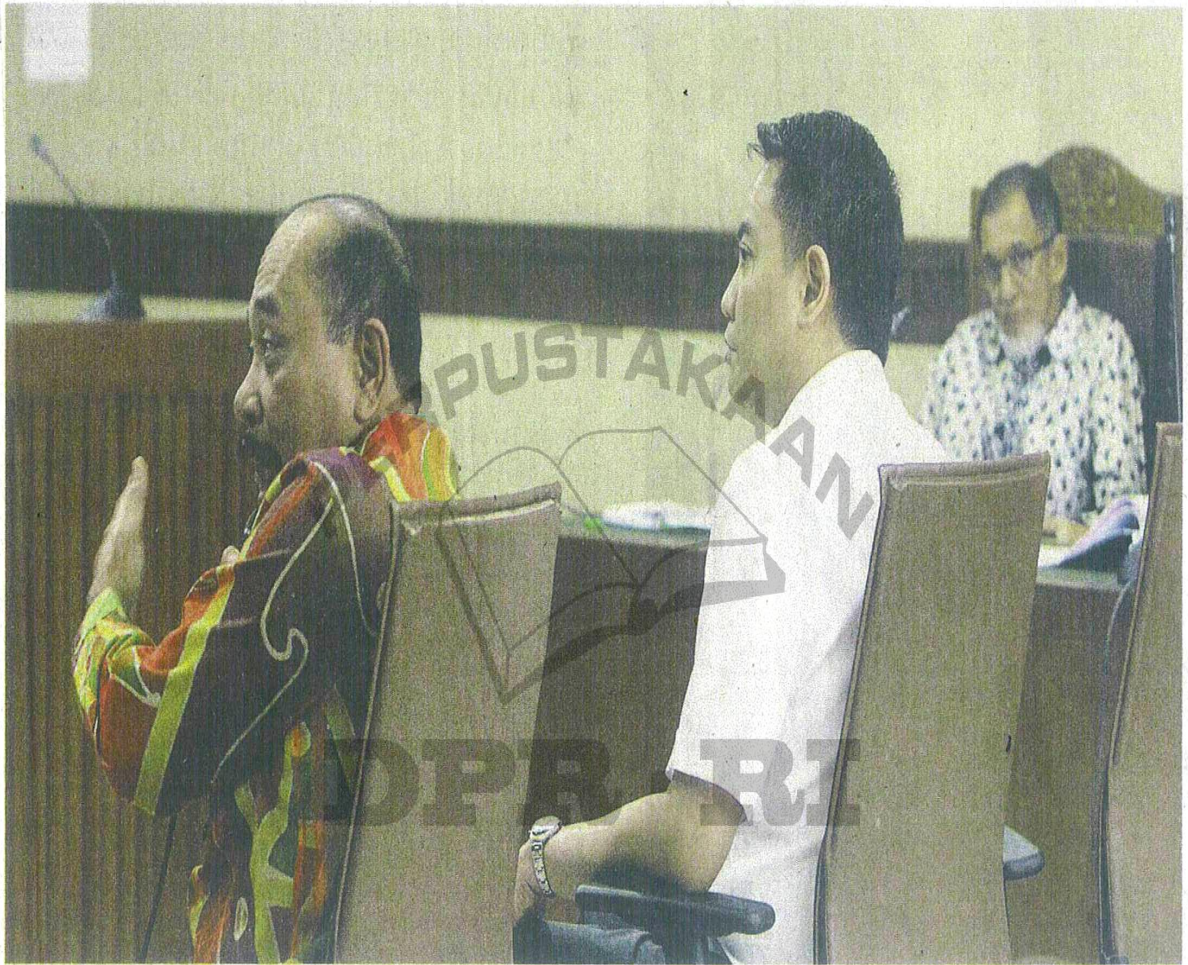
Menanggapi sejumlah bukti percakapan yang dibuka jaksa pada KPK, Fayakhun yang juga dihadirkan sebagai saksi mengaku bahwa potongan percakapan itu hanya mengklaim namanya. "Nama saya sudah dicatut (dalam percakapan itu)," ucapnya.

Menurut Fayakhun, dirinya memang sudah lama mengenal

Erwin karena sama-sama pernah sekolah teknik di Jerman. Oleh karena itu, atas permintaan Erwin, dia menyanggupi bertemu Erwin dan Fahmi untuk membahas anggaran pengadaan satelit monitoring dan *drone* di Bakamla.

"Mereka (Erwin dan Fahmi) meminta bantuan perihal Bakamla. Saat itu, saya menolak karena prosesnya di Bakamla dan tak ada kaitannya dengan saya," ujarnya.

Ia juga mengatakan, akun WhatsApp dan Blackberry Messenger miliknya pernah dibajak. Akibat pembajakan itu, sejumlah rekannya dimintai uang oleh orang tak dikenal. Dengan alasan tersebut, Fayakhun membantah seluruh bukti percakapan yang ditampilkan jaksa. (MDN)



KOMPAS/ALIF ICHWAN

Sidang lanjutan kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring dan *drone* di lingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan terdakwa Nofel Hasan, mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (31/1). Agenda sidang antara lain mendengarkan keterangan sejumlah saksi, di antaranya Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo (kiri) dan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi (tengah).